

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Signalling Theory

Menurut Jama'an (2008) Teori Pensinyalan (*Signalling Theory*) mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik.

Dalam konteks ini, pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal baik kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat terus mendukung program kegiatan pemerintah, sehingga program kegiatan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Laporan keuangan dapat dijadikan salah satu sarana untuk memberikan sinyal baik kepada masyarakat, kinerja pemerintah yang baik perlu diinformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat.

2.2 Agency Theory

Menurut Halim (2008) Teori keagenan adalah teori hubungan antara principal dan agen. Dalam hubungan tersebut principal (misalnya rakyat yang diwakili oleh DPRD) mempercayakan pengelolaan kekayaannya kepada agen (misalnya pemda/gubernur/walikota).

Dalam konteks teori keagenan, pemerintah daerah berperan untuk mengelola dana masyarakat guna memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk digunakan kembali oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fadzil dan Nyoto (2011) juga menyatakan bahwa terdapat hubungan principal-agen antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah pusat bertindak sebagai prinsipal dan Pemerintah Daerah bertindak

sebagai agen. Hal ini dikarenakan, Indonesia adalah Negara kesatuan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab kepada Pemerintah Pusat dan juga kepada masyarakat daerah.

2.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan tersruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi(*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang diaolkasikan dan apakah generasi yang akan datang diasusmsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.3.1 Komponen Laporan Keuangan

Menurut Tanjung (2014) komponen laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional (LO);
- 5) Laporan Arus Kas (LAK);
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Uraian mengenai komponen-komponen laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari entitas pelaporan. Informasi LRA berguna bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya

ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. LRA memuat informasi-informasi sebagai berikut:

- a. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam evaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode selanjutnya, LRA disajikan secara komperatif. LRA menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah, sehingga dapat sebagai alat penilaian kegiatan/program yang dilaksanakan secara efisien, efektif, serta sesuai dengan anggaran APBN/APBD dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar rinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Struktur LRA Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki struktur yang berbeda. Perbedaan struktur lebih dikarenakan adanya perbedaan sumber pendapatan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus/defisit, akuntansi pembiayaan dan akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) yang mana berdasar pada basis kas.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah. Entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan tidak lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Apabila suatu entitas memiliki aset yang akan dilibatkan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi atas aset. Neraca akan memberikan informasi mengenai aset yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya yang termasuk klasifikasi aset lancar dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang yang termasuk klasifikasi aset tidak lancar. Entitas pelaporan harus menerapkan pencatatan neraca basis akrual, mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibebankan dalam waktu lebih dari dua belas bulan.

Informasi tentang tanggal jumlah tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset non-keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui klasifikasi Aset dan Kewajiban.

Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: (1) kas dan setara kas; (2) investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) persediaan; (5) investasi jangka panjang; (6) aset tetap; (7) kewajiban jangka pendek; (8) kewajiban jangka panjang; dan (9) ekuitas.

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Selain pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pos-pos lain dalam neraca, sepanjang penyajian tersebut untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas dan tidak bertentangan dengan SAP.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah dalam neraca didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- a. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
- b. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
- c. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Struktur neraca pemerintah pusat memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan struktur neraca pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota). Perbedaan tersebut diakibatkan karena kepemilikan aset negara berbeda dengan kepemilikan aset di daerah, aset negara lebih kompleks dibandingkan dengan aset daerah.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-

LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

- a. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- b. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan operasional dianalisis menurut klasifikasi ekonomi, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode sederhana untuk

diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi. Laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, bebanbeban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya maka, penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih berkualitas bagi pengguna.

Pemilihan penggunaan kedua metode klasifikasi beban tersebut tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Metode yang digunakan dapat memberikan indikasi beban yang mungkin berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung. SAP memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak pada entitas tersebut. Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi juga harus mengungkapkan tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, antara lain meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

Struktur LO Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki perbedaan. Perbedaan struktur tersebut juga diakibatkan karena perbedaan sumber pendapatan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Struktur LO dan LRA dapat dibandingkan sebagai berikut:

- a. Pengelompokan pada LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, sedangkan pengelompokan pada LO terdiri dari pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa.
- b. LRA menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis kas, sedangkan LO menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis akrual.

- c. Akibat dari perbedaan basis akuntansi yang digunakan, pada LRA, pembelian aset tetap dikategorikan sebagai belanja modal atau pengurang pendapatan, sedangkan pada LO, pembelian aset tetap tidak diakui sebagai pengurang pendapatan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Pemerintah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun Laporan Arus Kas (LAK) untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah. Tujuan dibuatnya LAK adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Informasi LAK berguna sebagai indikator jumlah arus kas di periode mendatang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. LAK menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. LAK memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah. LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk

mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Transaksi mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periodeperiode sebelumnya;
- b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Entitas pelaporan yang perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPE yang dijelaskan pada CaLK. Struktur Laporan Perubahan Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi kuantitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan

pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara dilaporkan secara lebih pragmatis.

CaLK pada dasarnya dimaksudkan agar laporan keuangan pemerintah dapat dipahami secara keseluruhan oleh pengguna secara luas, tidak terbatas hanya untuk lingkungan pemerintah. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman bagi pengguna maupun pembaca laporan keuangan pemerintah, dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan setiap entitas pelaporan (pemerintah) menambah atau mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam CaLK, selama perubahan tersebut tidak mengurangi ataupun menghilangkan substansi informasi yang harus disajikan.

Pemahaman yang memadai terhadap komponen laporan keuangan pemerintah diperlukan dalam menilai kualitas laporan keuangan yang disajikan. Penggunaan laporan keuangan yang memahami isi/pos-pos dari setiap komponen laporan keuangan dapat memberikan apresiasi terhadap pengelolaan keuangan pemerintahan. Pengguna laporan keuangan dapat mengetahui jumlah dan sumber dana yang dikelola pemerintah dalam setiap periodenya, bagaimana pengelolaannya, termasuk dapat menelusuri lebih jauh penggunaan dana masyarakat tersebut.

Informasi dalam laporan keuangan berguna untuk mengetahui jumlah serta macam aset tetap yang dimiliki maupun anggaran yang dikelola. Pencatatan atas aset dan anggaran yang dikelola instansi pemerintah ini berguna untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Kinerja pemerintah dapat teridentifikasi secara jelas serta masyarakat dapat memberikan tanggapan atau penilaian terhadap kinerja pemerintah tersebut sehingga tercapainya *good governance*.

Laporan keuangan sudah bersifat *general purposive* dengan kata lain dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi semua pihak, tetapi tidak semua pengguna dapat memahami laporan keuangan pemerintah dengan baik. Hal ini terjadi disebabkan karena, perbedaan latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Mengatasi hal tersebut, agar pengguna dapat menginterpretasikan informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan secara tepat maka diperlukan hasil analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah.

2.3.2 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Bastian (2010), kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan”.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melakukan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap undang-undang.

2.3.3 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan mengungkapkan informasi yang penting bagi berbagai pihak. Agar tujuan tersebut tercapai, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan antara lain: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 dalam tanjung (2012) menetapkan karakteristik laporan keuangan sebagai berikut:

“Ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi khususnya laporan keuangan sehingga dapat memenuhi tujuan instansi terkait. Karakteristik yang dimaksud merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan memenuhi kualitas yang dikehendaki. Karakteristik yang dimaksud adalah :

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

Uraian mengenai karakteristik laporan keuangan di atas adalah sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini; dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

- a) Memiliki manfaat umpan balik
- b) Memiliki manfaat prediktif

- c) Tepat waktu
- d) Lengkap

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Keandalan informasi dipengaruhi oleh:

- a) Penyajian jujur
- b) Dapat diverifikasi (*verifiability*)
- c) Netralitas

3. Dapat dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan instansi antar periode untuk mengidentifikasi realisasi anggaran dan sebagai evaluasi kinerja. Laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan agar dapat dilakukan uji antar instansi untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi maupun peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan laporan keuangan adalah kemudahan untuk segera dapat dipahami pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan

katekunan yang wajar, namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2.4 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan pada sektor publik pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada sektor ekonomi, sosial dan politik. Dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam.

Menurut Halim (2007) definisi dari akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi).”

Menurut Komalasari (2016) sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)”.

Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah itu sendiri terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata

usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 70 ayat 1 yang berbunyi:

“Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta laporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi”.

Sedangkan didalam Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 23 ayat 1, mengemukakan:

“Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.”

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

Adapun pengembangan atas sistem akuntansi yang baru, yaitu:

1. Pengembangan sistem pembukuan berganda (*double entry*), dimana setiap transaksi dicatat dengan jurnal berpasangan, yaitu sisi debit dan sisi kredit.
2. Basis Akrua (*accrual basis*) dengan mengembangkan prinsip dan asumsi bahwa pencatatan transaksi keuangan hanya dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran uang. Dengan basis akrual, informasi yang akan diberikan kepada pemakai tidak hanya terbatas pada transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas, melainkan juga

kewajiban yang membutuhkan penyelesaian kas dimasa depan dan informasi lain yang mempersentasikan kas yang akan diterima dimasa depan (Komalasari, 2016).

2.5 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan lingkungan pemerintah daerah”.

Keberadaan PP No. 60 Tahun 2008 tersebut, merupakan perwujudan dari amanat Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- a. Pada pasal 55 ayat (4) yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- b. Pada pasal 58 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2.5.1 Tujuan Pengendalian Intern

Menurut Bastian (2009) tujuan pengendalian intern adalah :

1. Untuk melindungi harta/aktiva organisasi dan pencatatan pembukuannya. Aktiva organisasi sektor public bias dicuri, dirusak atau disalahgunakan secara sengaja atau tidak sengaja. Demikian juga dengan aktiva tidak nyata, seperti dokumen penting, surat berharga, dan catatan keuangan. Sistem pengendalian intern dibentuk untuk mencegah atau menemukan aktiva yang hilang dan catatan pembukuan pada saat yang tepat.
2. Mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi. Manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diuji kecermatannya untuk melaksanakan operasi. Sistem pengendalian intern dapat mencegah atau menemukan kesalahan pada saat yang tepat.
3. Meningkatkan efisiensi usaha, Pengendalian dalam organisasi bertujuan untuk menghindari pekerjaan berganda yang tidak perlu, dan mencegah pemborosan terhadap semua aspek usaha termasuk pencegahan terhadap penggunaan sumber dana yang tidak efisien.
4. Mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian intern memberikan jaminan bahwa prosedur dan peraturan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan,

2.5.2 Komponen-Komponen Pengendalian Intern

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) mengenalkan bahwa terdapat 5 (lima) komponen kebijakan dan prosedur yang didesain dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan

pengendalian intern dapat dicapai. Kelima komponen pengendalian intern tersebut adalah:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Komponen ini meliputi tindakan, kebijakan dan prosedur yang menggambarkan:

- a. Integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia;
- d. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab;
- e. Filosofi manajemen dan gaya operasi;
- f. Dewan direksi dan partisipasi komite audit;
- g. Struktur organisasi.

Contoh: *code of conduct*, pemberian dan pemisahan fungsi wewenang dan tanggung jawab, *job description*, dan kebijakan sumber daya manusia seperti pelatihan dan kompensasi.

2. Penilaian Risiko Manajemen (*Management Risk Assessment*)

Perusahaan harus mewaspadaikan dan mengelola risiko yang dihadapinya. Perusahaan harus menetapkan tujuan, terintegrasi dengan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan dan aktivitas-aktivitas lainnya sehingga organisasi beroperasi secara harmonis. Perusahaan juga harus menetapkan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko terkait.

Contoh: *penggunaan Key Performance Indicator (KPI)*, *survey kepuasan customer*, dan *Balance Score Card (BSC)*.

3. Sistem Komunikasi dan Informasi Akuntansi (*Accounting Information and Communication System*).

Komunikasi informasi tentang operasi pengendalian intern memberikan substansi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi efektivitas kontrol dan untuk mengelola operasinya. Keakuratan dan ketepatan informasi dibutuhkan guna mengambil suatu keputusan. Selain itu, dengan system informasi dan komunikasi memungkinkan karyawan perusahaan mendapatkan dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.

Contoh: *staff meeting* bulanan, *news letter* dari perusahaan, dan *process for escalation of issues*.

4. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk menghadapi risikorisiko yang terkait dalam mencapai tujuan satuan usaha (entitas).

Contoh: rekonsiliasi, protek *user-ID* dan *password* dan verifikasi tandatangan atas penarikan cek.

5. Pemantauan (*Monitoring*).

Keseluruhan proses harus dimonitor, dan dibuat perubahan bila diperlukan. Dengan cara ini, sistem dapat bereaksi secara dinamis, berubah seiring dengan perubahan kondisi.

Contoh: *ongoing review of operations*, penilaian kinerja karyawan dan *exception reporting*.

2.5.3 Keterbatasan Pengendalian Intern

Kehadiran pengendalian intern pemerintah hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen atau pimpinan pemerintah berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian

tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern sangatlah besar. Keterbatasan sistem pengendalian intern dikemukakan oleh Bastian (2010) sebagai berikut:

“Tidak ada sistem pengendalian intern yang dengan sendirinya dapat menjamin administrasi yang efisien serta kelengkapan dan akurasi pencatatan. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh:

1. Pengendalian intern yang bergantung pada pemisahan fungsi dapat dimanipulasi dengan kolusi.
2. Otorisasi dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu atau oleh manajemen.
3. Personel keliru dalam memahami perintah sebagai akibat dari kelalaian, tidak diperhatikan, maupun kelelahan.”

2.5.4 Ciri-ciri Pengendalian Internal yang Kuat

Menurut Komalasari (2016) menjelaskan ciri-ciri dari pengendalian internal yang kuat, yakni:

1. Karyawan yang kompeten dan jujur, antara lain, menguasai standar akuntansi, peraturan perpajakan, dan peraturan pasar modal.
2. Transaksi diotorisasi oleh pejabat yang berwenang (transaksi absah).
3. Transaksi dicatat dengan benar (jumlah, estimasi dan perlakuan akuntansi).
4. Pemisahan tugas yang mengambil inisiatif timbulnya suatu transaksi, yang mencatat dan menyimpan.
5. Akses terhadap asset dan catatan perusahaan sesuai dengan fungsi dan tugas karyawan.

6. Perbandingan secara periodik antara saldo menurut buku dengan jumlah secara fisik.

2.5.5 Prinsip-prinsip Pengendalian Intern

Prinsip-prinsip Pengendalian Intern menurut Bastian (2010) :

1. Sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus menerus (*continuous built in*) Pengendalian intern bukanlah suatu kejadian yang tunggal, tetapi merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan yang meliputi operasi organisasi. Tindakan-tindakan ini melekat dalam metode yang digunakan manajemen untuk melaksanakan kegiatannya.

Pengendalian intern tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang terpisah atau suatu sistem tersendiri dalam suatu bagian, tetapi lebih merupakan suatu bagian yang terpadu dari proses kegiatan operasional yang dikelola pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian intern merupakan bagian dari proses, menyatu dengan proses, dan menyatu dengan kegiatan operasional instansi. Sistem pengendalian intern akan sangat efektif apabila dibangun ke dalam infrastruktur suatu instansi dan menjadi bagian dari organisasi yang dikenal dengan istilah *built in* (dibangun di dalam dan menjadi satu kesatuan).

Pengertian *built in* adalah suatu proses yang terintegrasi dengan kegiatan yang berarti sistem pengendalian sesuatu yang menyatu pada kegiatan yang selama ini dilaksanakan, bukan sesuatu yang ditambahkan pada kegiatan yang selama ini masih ada. Sistem pengendalian intern akan menyatu dengan pelaksanaan fungsi manajemen, mulai dari perencanaan sampai evaluasi.

2. Sistem pengendalian intern bergantung pada faktor manusia

Sistem pengendalian intern dipengaruhi oleh manajemen dan pegawai dalam suatu instansi, yang pencapaian tujuannya dilakukan melalui orang dalam instansi. Sering dijumpai dalam praktik bahwa suatu instansi memiliki pedoman pengendalian yang baik, namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Akibatnya, pengendalian yang telah dirancang tersebut tidak memberikan kontribusi positif bagi instansi. Sistem pengendalian intern dapat berjalan efektif jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh manusia. Tanggung jawab berjalannya sistem pengendalian intern sangat tergantung pada manajemen. Manajemen menetapkan tujuan, merancang dan melaksanakan mekanisme pengendalian, memantau, serta mengevaluasi pengendalian. Selanjutnya, seluruh pegawai dalam instansi memegang peranan penting untuk melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif. Dengan demikian para pegawai dengan jelas harus memahami tanggung jawab dan batas wewenangnya serta pengaruhnya terhadap pencapaian efektivitas dari struktur pengendalian intern yang ada dalam organisasi tersebut.

3. Sistem pengendalian intern memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak.

Walaupun pengendalian intern dibuat dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, pengendalian intern yang telah dirancang dan diimplementasikan dalam suatu organisasi tidak dapat memberikan keyakinan mutlak. Manajemen harus merancang dan mengimplementasikan pengendalian intern berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya. Pada dasarnya, pengendalian intern hanya memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan. Kesalahan dalam memberikan penilaian, pertimbangan yang keliru, dan tindakan kolusi untuk mengelak dari pengendalian dapat menghambat pencapaian tujuan. Namun, struktur pengendalian intern

yang efektif dapat memberikan keyakinan terbaik bahwa kejadian yang tidak diharapkan dapat diminimalkan untuk mencapai tujuan organisasi.

4. Sistem pengendalian intern diterapkan sesuai dengan kebutuhan, ukuran, kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Sistem pengendalian intern dirancang untuk membantu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga bentuk, luas, dan kedalaman pengendalian akan bergantung pada tujuan dan ukuran instansi, karakter operasi dan lingkungan dimana kegiatan instansi dilaksanakan. Dengan konsepsi ini, tidak ada pengendalian yang dimiliki suatu instansi langsung dapat ditiru dan diterapkan pada instansi lain. Sistem pengendalian intern harus dirancang sesuai kebutuhan dan ciri kegiatan serta lingkungan yang melingkupinya. Sejalan dengan pemahaman tersebut, Peraturan Pemerintah tentang SPIP juga menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, termasuk sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah.

2.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah karakteristik dasar atau kemampuan sumber daya manusia dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai. Tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentuan ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, suksesi perencanaan, evaluasi kinerja, dan pengembangan SDM.

Kompetensi menurut Spencer & Spencer dalam Sudarmanto (2009) adalah “karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi”. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

“Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan.

2.6.1 Komponen kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Spencer & Spencer dalam Sudarmanto (2009) terdapat 5 (lima) komponen kompetensi, adalah sebagai berikut:

1. “Motif (*motive*), adalah hal-hal yang seseorang pikir atau inginkan secara konsisten yang menimbulkan tindakan.
2. Sifat (*traits*), adalah karakteristik fisik dan respon-respon konsisten terhadap situasi atau informasi.
3. Konsep diri (*self-concept*), adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang.
4. Pengetahuan (*knowledge*), adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan (*knowledge*) merupakan kompetensi yang kompleks.
5. Keterampilan (*skill*), adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental”.

Menurut Spencer & Spencer yang dikutip oleh Sudarmanto (2009), mengatakan bahwa konsep diri (*self-concept*), watak/sifat (*traits*) dan motif kompetensi lebih tersembunyi (*hidden*), dalam (*deeper*) dan berbeda pada titik sentral kepribadian seseorang juga cenderung sulit untuk dikembangkan dalam program pelatihan

dan pengembangan. Kompetensi pengetahuan (*knowledge competencies*) dan keahlian (*skill competencies*) cenderung lebih nyata (*visible*) dan relatif berbeda di permukaan sebagai salah satu karakteristik yang dimiliki manusia serta mudah dikembangkan dalam program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

2.6.2 Faktor-faktor pembentuk kompetensi sumber daya manusia

Semua organisasi tentu menginginkan sumber daya manusia mereka memiliki kompetensi yang unggul dan handal, sehingga mampu mendongkrak kinerja organisasi. Untuk itu diperlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap faktor-faktor determinan bagi kompetensi. Menurut Zwell dalam Sudarmanto (2009) terdapat tujuh determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi, yakni:

1. Kepercayaan dan nilai.

Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki sikap tidak kreatif dan inovatif cenderung tidak berpikir dan bersikap untuk menemukan sesuatu yang baru dan memberikan tantangan bagi dirinya. Kepercayaan dan nilai seseorang dapat diubah. Namun, hal ini sangat sulit dan memakan waktu yang lama, karena nilai dan kepercayaan sering kali telah menjadi karakter, pandangan, atau identitas seseorang. Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap kepercayaan dan nilai, dan budaya perusahaan memiliki dampak signifikan terhadap aspek-aspek kompetensi. Kompetensi berakar pada budaya organisasi. Budaya organisasi terbentuk dari aspek nilai dan kepercayaan seseorang.

2. Keahlian/keterampilan

Aspek ini memegang peranan sangat penting dalam membentuk kompetensi. Sebagai contoh, *public speaking* adalah keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki. Keahlian menulis juga dapat diperbaiki dengan instruksi, latihan, dan umpan balik. Dengan memperbaiki kemampuan bicara dan keterampilan menulis, seseorang secara tidak langsung juga meningkatkan kecakapan kompetensi komunikasinya. Pengembangan keahlian khusus yang berhubungan dengan kompetensi dapat berdampak pada budaya perusahaan/organisasi dan kompetensi individu.

3. Pengalaman

Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas yang diberikan. Seseorang dengan sejumlah pengalaman tertentu akan lebih mudah mengorganisir orang lain dalam organisasi yang kompleks dengan penguasaan kompetensi manajerialnya yang tinggi dan akan sangat berbeda apabila dibandingkan dengan seseorang yang tidak mempunyai pengalaman sama sekali. Akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang menyatu dalam diri seseorang akan menjadikan orang tersebut memiliki kompetensi yang tidak disadari dalam dirinya, atau akan terbentuk dalam sikap dan perilaku seseorang.

4. Karakteristik personal

Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Kompetensi seseorang dalam manajemen konflik dan negosiasi dari orang yang memiliki sifat *introvert* akan berbeda dengan orang yang memiliki sifat *ekstrovert*. Karakteristik kepribadian dapat diubah, tetapi cenderung lebih sulit.

5. Motivasi

Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Motivasi merupakan faktor kompetensi yang sangat penting. Motivasi merupakan faktor yang cenderung dapat diubah. Dorongan, penghargaan, pengakuan dan perhatian terhadap individu dapat berpengaruh terhadap motivasi seseorang.

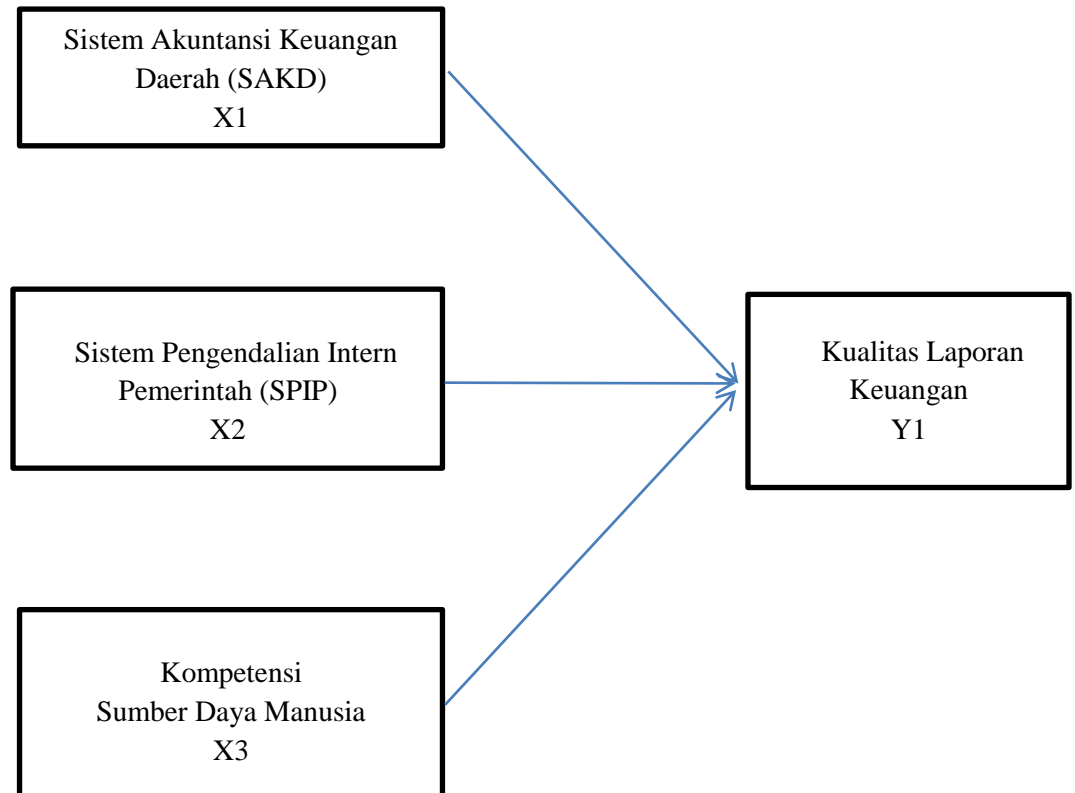
6. Isu-isu emosional

Hambatan dan blok-blok emosional sering kali dapat membatasi penguasaan kompetensi. Ketakutan membuat kesalahan, perasaan malu, perasaan tidak suka, selalu berpikir negatif terhadap seseorang, pengalaman masa lalu yang selalu negatif sangat berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi seseorang. Hal-hal tersebut pada dasarnya dapat diubah dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif, melakukan beberapa terapi, dan mendorong seseorang agar dapat mengatasi hambatan dan blok-blok tersebut.

7. Kapasitas intelektual

Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Kompetensi tergantung pada kemampuan kognitif, seperti berpikir konseptual dan berpikir analitis. Perbedaan kemampuan berpikir konseptual dan berpikir analitis antara satu sama lain akan membedakan kompetensi seseorang dalam pengambilan keputusan, kompetensi perencanaan, dan lain sebagainya

2.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Susilawati, Dwi Seftihani Riana (2014)	Standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern sebagai anteseden kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 13%, namun tidak signifikan. Sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan

			keuangan pemerintah daerah sebesar 74,6%.
2.	Nurillah As Syifa Muid Dul (2014)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pemerintah memiliki efek positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3.	Hafiz Saputro (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi, Pemanfaatan	Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka hasil penelitian ini dapat ditarik
		teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Sukoharjo (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Sukoharjo Periode 2015-2016)	kesimpulan sebagai berikut: Kompetensi sumber daya manusia, Pemanfaatan teknologi informasi, Sistem pengendalian intern berpengaruh. Sedangkan, Penerapan sistem akuntansi tidak berpengaruh
4.	Tri Gita Gumanti (2015)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya

		Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada Dinas Pemertintah Kota Bandung)	Manusia dan Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan 2. Secara simultan, kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
5.	Komalasari (2016)	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui secara parsial Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan
		Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2.9 Bangunan Hipotesis

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan, teori, konsep, serta kerangka pemikiran yang sebelumnya disajikan, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Menurut Halim (2007) definisi dari akuntansi keuangan daerah adalah Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi

yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi).

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka dibutuhkan suatu sistem akuntansi yang baik. Informasi yang terkandung dalam Laporan Keuangan dapat dijadikan suatu dasar dalam pengambilan keputusan pemerintah, oleh karena itu laporan keuangan yang dipublikasi harus disajikan secara wajar terbebas dari kesalahan material yang dapat menyesatkan para penggunanya. Apabila laporan keuangan yang dihasilkan buruk, artinya laporan keuangan tersebut dihasilkan dari sistem akuntansi yang buruk sehingga terjadi kesalahan material dan tidak disusun sesuai dengan standard yang telah ditetapkan. Dalam penelitian Nurillah (2014) menyatakan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Rahayu (2014) menyatakan hasil yang serupa, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Komalasari (2016) juga menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Ha1 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan lingkungan pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan juga bahwa salah satu tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya keandalan laporan keuangan. Lemahnya

pengendalian intern dapat menyebabkan terbukanya peluang untuk melakukan penyimpangan dalam anggaran APBN/APBD.

Dalam hasil penelitian Susilawati (2014) menyatakan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian Saputro (2015) menyatakan hasil yang sama, yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Komalasari (2016) juga menyatakan hasil yang serupa yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Ha2 : Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi menurut Spencer & Spencer dalam Sudarmanto (2009) adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi.

Dengan adanya Kompetensi Sumber Daya maka peranana dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan organisasi akan berjalan dengan baik. Apapun sistem akuntansi yang diterapkan akan berjalan dengan baik apabila Sumber Daya Manusia sudah memiliki kompetensi yang baik dalam menyusun laporan keuangan.

Dalam penelitian Hafiz Saputro (2015) memiliki hasil bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian Anisma, dkk (2014) menyatakan hasil yang serupa, yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Ha3 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.